

**PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN
TERHADAP PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN
DENGAN PP NO. 47 TAHUN 2012 SEBAGAI
VARIABEL *MODERATING***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur, Tambang, dan Perkebunan
yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan
Termasuk dalam PROPER Tahun 2010-2013)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

RUDI KURNIAWAN
NIM. C2C009137

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rudi Kurniawan
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009137
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN
TERHADAP PENGUNGKAPAN
LINGKUNGAN DENGAN PP NO. 47 TAHUN
2012 SEBAGAI VARIABEL *MODERATING*
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur,
Tambang, dan Perkebunan yang Terdaftar
pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan
Termasuk dalam PROPER Tahun 2010-2013)**
Dosen Pembimbing : Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, M.Acc, Akt.

Semarang, 30 Juni 2014
Dosen Pembimbing

(Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, M.Acc, Akt.)
NIP 19610109 198803 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Rudi Kurniawan
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009137
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN
TERHADAP PENGUNGKAPAN
LINGKUNGAN DENGAN PP NO. 47 TAHUN
2012 SEBAGAI VARIABEL *MODERATING*
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur,
Tambang, dan Perkebunan yang Terdaftar
pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan
Termasuk dalam PROPER Tahun 2010-2013)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 16 Juli 2014

Tim Penguji:

1. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, M.Acc, Akt. (.....)
2. Dr. Dwi Ratmono, SE., M.Si. (.....)
3. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rudi Kurniawan, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN DENGAN PP NO. 47 TAHUN 2012 SEBAGAI VARIABEL *MODERATING* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur, Tambang, dan Perkebunan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Termasuk dalam PROPER Tahun 2010-2013)”** , adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan hal ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 17 Juni 2014

Yang membuat pernyataan,

(Rudi Kurniawan)

NIM : C2C009137

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

KARENA SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN...
SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN...

(Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

*Ibu dan Bapak tercinta, serta saudara-saudaraku tersayang,
sebagai sumber utama cinta, kasih sayang, dan dukungan.*

Mas Arifin, (Alm.)

Atas dorongan dan dukungannya saya bisa kuliah disini hingga selesai.

*Sahabat-sahabatku tersayang, yang jauh maupun dekat,
sebagai teman dalam suka maupun duka.*

*Kepada diriku sendiri,
sebagai hadiah atas kerja keras yang dilakukan selama ini.*

*Terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan.
Allah SWT sebagai pembalas terbaik atas segala kebaikan yang diberikan.*

ABSTRACT

Issuance of PP No. 47 Tahun 2012 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” makes the company must take responsibility for its activities in the social and environmental fields and must be reported in the company annual report. The research objective is to get empirical evidence about the influence of environmental performance to environmental disclosure with PP No. 47 Tahun 2012 as a moderating variable. In this research, environmental performance and environmental disclosure are measured by PROPER and GRI 3.0 (Global Reporting Initiative) score. Variable of PP No. 47 Tahun 2012 is only used to split all the data into 2 sub-groups, data sample before the issuance of PP and after the issuance of PP.

The population of this research is manufacturing, mining, and plantation companies listing in Indonesian Stock Exchange (IDX) and including in PROPER 2010-2013. Purposive sampling method is used to collect the data for this research. The total research observations is 92 companies. The hypotheses in this study were tested using linear regression with moderating variable.

The result of this study shows that environmental performance has a significant positive effect on environmental disclosure and PP No. 47 Tahun 2012 has no significant effect on the relationship between environmental performance and environmental disclosure.

Keywords: PP No.47 Tahun 2012, corporate social responsibility, environmental performance, environmental disclosure.

ABSTRAK

Diterbitkannya PP No. 47 Tahun 2012 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” membuat perusahaan wajib mempertanggungjawabkan aktivitasnya dalam bidang sosial dan lingkungan dan dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan dengan PP No. 47 Tahun 2012 sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian ini, kinerja lingkungan diukur dengan menggunakan PROPER dan pengungkapan lingkungan diukur dengan skor (*Global Reporting Initiative*) GRI 3.0. Variabel PP No. 47 Tahun 2012 hanya digunakan untuk membagi kelompok data menjadi 2 sub-kelompok, yaitu kelompok data sebelum PP dan kelompok data sesudah PP.

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan tambang, manufaktur, dan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan termasuk dalam PROPER tahun 2010-2013. Teknik pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling*. Total perusahaan yang di observasi adalah 92 perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier dengan variabel moderasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan lingkungan dan PP No. 47 Tahun 2012 tidak berpengaruh terhadap hubungan antara kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan.

Kata kunci: PP No. 47 Tahun 2012, tanggung jawab sosial dan lingkungan, kinerja lingkungan, pengungkapan lingkungan.

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabaraakatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN DENGAN PP NO. 47 TAHUN 2012 SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur, Tambang, dan Perkebunan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Termasuk dalam PROPER Tahun 2010-2013)”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Ph.D., M.Si., Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dr. P. Basuki Hadiprajitno MBA., Macc., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan memberikan masukan, nasehat serta semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Drs. Sudarno, M.Si.,Akt., Ph.D. selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dalam menjalani masa perkuliahan.
5. Seluruh staf pengajar, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa.
7. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ibu Siti Machwiyah dan Bapak Kustam, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, perhatian, doa dan kasih sayang yang tak terhingga. Terimakasih. Ini adalah sebagian kecil hal yang ingin aku persembahkan untuk membahagiakan kalian.
8. Kakak-kakak tercinta Mbak Ida, Mas Syamsul, dan Mbak Yun yang telah memberikan kasih sayang, contoh baik serta nasihat yang bermanfaat yang menjadikan penulis terdorong untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Almarhum Mas Arifin, yang telah mendorong serta memberi semua dukungan sehingga saya bisa kuliah disini hingga selesai. Semoga kesabaran dan amal baik yang diberikan menjadi amal jariyah untuk beliau. Aamiin.

10. Keluarga dan teman-teman Jombang yang memberi pelajaran tentang arti perjuangan serta semangat berupa dorongan untuk segera menyelesaikan kuliah ini.
11. Sahabat-sahabatku, Gallus, Teguh, Putra yang selama ini telah menjadi teman yang selalu ada dalam galau, riang, suntuk, jengkel, geram, gusar, dan apapun jenis perasaan yang ada. Hehe. Terima kasih semangat yang diberikan untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kedekatan antara kita dan dimudahkan jalan kita menuju sukses masing-masing. Aamiin.
12. Keluarga besar Unit Pengembangan Komputer Fakultas Ekononika dan Bisnis. Gallus, Putra, Tara, Ayu, Hakim, Mas Syam, Mas Singgih, Mbak Mega, Mbak Retno, Mas Icha, Mas Adit, Mbak Dini, Mas Mirwan, Mas Panji, Mas Munir, Mas Bagus, Mas Hajam, Bang Holong, Mas Wicak, Pak Adit, Pak Rizal dan masih banyak lainnya termasuk adik-adik yang baru yang tidak harus saya sebut satu-satu. Dalam benak penulis semuanya sangat berarti dan terima kasih sekali telah mengajarkan penulis tentang arti kebersamaan. Dan tak juga terima kasih atas bantuan fasilitas maupun arahan sehingga skripsi ini bisa selesai.
13. Keluarga besar ZIS. Mas Bisri, Mas Ganang, Gallus, Teguh, Putra, dan Theda yang telah memberi bekal ilmu yang bermanfaat untuk di dunia maupun di akhirat.

14. Keluarga besar Beasiswa Produktif PKPU, Pak Aan, Pak Pri, Ngabidin, Doni, Hanafi, Irfan, Shabrina, Yuyun, Sania, Mbak Mila, Mbak Nurul dan banyak lagi yang semuanya telah banyak mengajarkan penulis tentang arti kebersamaan, komitmen, dan kepedulian. Kalian semua mendorongku untuk segera menyelesaikan kuliah ini. Terima kasih.
15. Partner bisnis saya, Yanto dan Yogi yang banyak menyumbang ilmu maupun pelajaran berharga, sehingga penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang diajarkan di kuliah selama ini
16. Serta tak mungkin ketinggalan yaitu teman maupun pihak lain yang jauh maupun dekat, Galuh Wulan Sari, Dik Adin, Mas Budi, Mas Bobby, Siska, Pak Sudaryanto, Bapak Aryo dan Ibu Sriani yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong penulis untuk dapat dan segera menyelesaikan skripsi ini.
17. Mas Sulis, Ramadhan, yang telah membantu memberikan ilmu dan masukan dalam pengolahan data.
18. Seluruh teman-teman Akuntansi 2009 Reguler 1 Universitas Diponegoro, terima kasih telah menjadi teman belajar yang menyenangkan dan saya sungguh sangat terbantu dengan adanya kalian.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berjasa dalam membantu proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penyusunan skripsi ini, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga amal baik tersebut akan mendapat rahmat dan karunia dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak sebagaimana mestinya. Aamiin.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Semarang, 17 Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| <i>ABSTRACT</i> | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 12 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 16 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 16 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian | 16 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA | 18 |
| 2.1 Landasan Teori | 18 |
| 2.1.1 Teori Legitimasi..... | 18 |

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------|
| 2.1.2 | Teori <i>Stakeholder</i> | 19 |
| 2.1.3 | Kinerja Lingkungan | 20 |
| 2.1.4 | Pengungkapan Lingkungan..... | 23 |
| 2.1.5 | Regulasi Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan | 27 |
| 2.2 | Penelitian Terdahulu | 28 |
| 2.3 | Kerangka Pemikiran Teoritis | 31 |
| | Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran Penelitian | 32 |
| 2.4 | Perumusan Hipotesis | 33 |
| 2.4.1 | Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Lingkungan | 33 |
| 2.4.2 | Pengaruh PP No. 47 Tahun 2012 terhadap Hubungan antara Kinerja Lingkungan dengan Pengungkapan Lingkungan..... | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | | 37 |
| 3.1 | Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel..... | 37 |
| 3.1.1 | Pengungkapan Lingkungan..... | 37 |
| 3.1.2 | Kinerja lingkungan | 38 |
| 3.1.3 | Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012..... | 39 |
| 3.2 | Penentuan Populasi dan Sampel | 40 |
| 3.3 | Jenis dan Sumber Data..... | 41 |
| 3.4 | Metode Pengumpulan Data..... | 41 |
| 3.5 | Metode Analisis | 42 |
| 3.5.1 | Statistik Deskriptif | 42 |
| 3.5.2 | Uji Penyimpangan Asumsi Klasik | 42 |

| | | |
|-----------------------------------|--|----|
| 3.5.2.1 | Uji Normalitas | 42 |
| 3.5.2.2 | Uji Heteroskedastisitas | 43 |
| 3.5.2.3 | Uji Autokorelasi..... | 43 |
| 3.5.3 | Pengujian Hipotesis | 44 |
| 3.5.3.1 | Koefisien Determinasi (R^2)..... | 45 |
| 3.5.3.2 | Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) | 45 |
| 3.5.3.3 | Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)..... | 46 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | | 47 |
| 4.1 | Deskripsi Objek Penelitian | 47 |
| 4.2 | Analisis Deskriptif Statistik..... | 48 |
| 4.3 | Uji Asumsi Klasik | 50 |
| 4.3.1 | Uji Normalitas..... | 50 |
| 4.3.2 | Uji Heteroskedastisitas | 52 |
| 4.3.4 | Uji Autokorelasi..... | 54 |
| 4.4 | Analisis Regresi | 56 |
| 4.5 | Koefisien Determinasi (R^2)..... | 58 |
| 4.6 | Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) | 60 |
| 4.7 | Uji Hipotesis | 61 |
| 4.8 | Interpretasi Hasil..... | 63 |
| BAB V PENUTUP..... | | 67 |
| 5.1 | Kesimpulan | 67 |
| 5.2 | Keterbatasan Penelitian | 69 |
| 5.3 | Saran | 69 |

| | |
|----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |
| LAMPIRAN..... | 73 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1 Kriteria Peringkat PROPER..... | 22 |
| Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu | 30 |
| Tabel 4.1 Proses Seleksi Objek Penelitian..... | 48 |
| Tabel 4.2 Statistik Deskriptif | 48 |
| Tabel 4.3 Uji Normalitas Model 1 | 51 |
| Tabel 4.4 Uji Normalitas Model 2 | 51 |
| Tabel 4.5 Uji Glejser Model 1..... | 53 |
| Tabel 4.6 Uji Glejser Model 2..... | 53 |
| Tabel 4.7 Run Test Model 1..... | 55 |
| Tabel 4.8 Run Test Model 2..... | 55 |
| Tabel 4.9 Uji t Model 1 | 57 |
| Tabel 4.10 Uji t Model 2..... | 57 |
| Tabel 4.11 Koefisien Determinasi Model 1 | 59 |
| Tabel 4.12 Koefisien Determinasi Model 2 | 59 |
| Tabel 4.13 Uji F Model 1 | 60 |
| Tabel 4.14 Uji F Model 2..... | 60 |
| Tabel 4.15 Rangkuman Hasil Hipotesis..... | 63 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran Penelitian | 32 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|--|---------|
| LAMPIRAN A TABEL INDEKS GRI (LINGKUNGAN) 3.0 | 73 |
| LAMPIRAN B DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL | 75 |
| LAMPIRAN C HASIL OLAH DATA STATISTIK | 80 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian bisa dijadikan sebagai indikator pertumbuhan negara. Pada awalnya, dalam perekonomian sederhana hanya ada dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Keberadaan perusahaan dalam perekonomian memiliki peran sebagai pihak yang mengelola faktor-faktor produksi untuk dapat memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan rumah tangga, sedangkan rumah tangga berperan sebagai konsumen yang sekaligus sebagai penyedia faktor-faktor produksi yang dibutuhkan perusahaan seperti modal, tanah, tenaga kerja, dan lain-lain.

Perusahaan sebagai pelaku kegiatan ekonomi negara, diharapkan dapat tumbuh dengan pesat guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Selain perannya sebagai penyedia barang dan jasa, perusahaan juga berperan sebagai penyumbang pajak bagi negara. Keberadaan perusahaan pada suatu daerah juga dapat mempercepat pertumbuhan daerah tersebut. Bisa dikatakan bahwa keberadaan suatu perusahaan akan membawa angin segar untuk daerah yang ditempatinya. Perubahan itu bisa dilihat mulai dari terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, kemudahan dalam memperoleh barang atau jasa, kemajuan teknologi, pembangunan infrastruktur di daerah sekitar, berkembangnya sarana transportasi dan telekomunikasi yang lebih baik, serta pertumbuhan ekonomi lainnya. Demikian tadi adalah sebagian dampak positif

yang dapat kita lihat dari pertumbuhan perusahaan di suatu daerah. Namun, pertumbuhan perusahaan pada suatu daerah tidaklah bebas dari dampak negatif.

Di antara dampak negatif yang ditimbulkan oleh berdirinya suatu perusahaan diantaranya ialah timbulnya polusi dan rusaknya lingkungan akibat limbah perusahaan maupun aktivitas perusahaan lainnya yang tidak ramah lingkungan. Solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini adalah peran dari perusahaan untuk mengatasi dampak dari limbah yang dihasilkan. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah limbah tersebut adalah dengan melakukan pengolahan, sterilisasi, edukasi ke masyarakat, pembuangan limbah ke area yang tepat, dan usaha-usaha lain yang tujuannya agar limbah atau aktivitas perusahaan tidak berdampak kepada perusakan lingkungan atau merugikan masyarakat. Selain itu dalam masalah ini pemerintah juga dapat berperan sebagai pihak yang mengeluarkan regulasi mengenai aturan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial maupun lingkungan.

Usaha-usaha yang dilakukan perusahaan seperti di atas adalah bagian dari kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Hingga saat ini, belum ada pengertian tunggal yang menjabarkan tentang CSR. Konsep CSR adalah suatu konsep dimana perusahaan harus bertanggung jawab atas *stakeholder*-nya dalam seluruh aspek operasional perusahaan (Pratama, 2013). Dalam ISO 26000, Social Responsibility mencakup 7 aspek utama, yaitu tata kelola organisasi, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, praktek bisnis yang adil, isu konsumen serta keterlibatan dan pengembangan masyarakat. Wibisono (2007 dalam Arifin, 2012) mengatakan, CSR adalah tanggung jawab perusahaan kepada para

pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Penjabaran yang lebih rinci diungkapkan oleh Prambudi (2006, dalam Santoso dan Rita, 2012) yang menyebutkan bahwa program-program CSR dikelompokkan menjadi tiga aspek, yakni:

1. Program Sosial

Program sosial merupakan program perusahaan yang melakukan kegiatan kedermawanan untuk membangun dan meningkatkan taraf hidup manusia. Contohnya: sumbangan kepada korban bencana alam, beasiswa pendidikan kepada pelajar yang kurang mampu, dan pelayanan dan kampanye kesehatan.

2. Program Lingkungan

Program lingkungan merupakan program perusahaan yang bertujuan untuk menjaga ekosistem dan lingkungan agar terjaga dari kerusakan dan meminimalisir terjadinya polusi akibat dari aktivitas perusahaan. Contohnya: program pengelolaan limbah, penanaman pohon, kampanye lingkungan hidup dan menghasilkan produk yang ramah lingkungan.

3. Program Ekonomi

Program ekonomi merupakan tindakan untuk terjun langsung di dalam masyarakat untuk membantu memperkuat ketahanan ekonomi dan menjadikan masyarakat yang mandiri. Seperti pembukaan lapangan kerja, membantu usaha mikro dan usaha produktif lainnya.

Sebagai bentuk tanggung-jawabnya terhadap lingkungan, perusahaan seharusnya melaksanakan kegiatan CSR ini sebagai suatu keharusan. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat juga telah membuat regulasi mengenai lingkungan yang tertuang dalam *US National Environment Policy Act* (NEPA) pada tahun 1970. Undang-Undang tersebut membahas tentang polusi udara, air dan tanah. Dalam aturan mengenai polusi air dalam *Clean Water Act*, perusahaan diharuskan untuk membuat laporan setiap bulan mengenai polusi air yang ditimbulkan (Chong dan Freedman, 2011). Meskipun regulasi mengenai kesadaran lingkungan telah dibuat, namun dalam pernyataan Kotler & Nance (2005 dalam Marnelly, 2012) dinyatakan bahwa gerakan CSR di negara-negara maju, terutama Amerika Serikat memang lebih banyak didorong oleh kesadaran secara sukarela (*voluntary driven*). Komisi Eropa dalam dalam *Green Paper* juga mengadopsi penerapan CSR secara sukarela melalui best practices (Marnelly, 2012).

Melihat contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika melakukan aktivitas CSR bukan semata-mata tuntutan dari Undang-undang, melainkan murni sebagai bentuk kesadaran dan komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, hukum atau regulasi seharusnya bukan dijadikan alasan perusahaan melakukan kegiatan CSR, melainkan hanya digunakan sebagai standard minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan CSR. Perusahaan seharusnya bisa menerapkan prinsip-prinsip yang lebih tinggi dari apa yang telah diatur atau diwajibkan oleh regulasi.

Indonesia sebagai negara berkembang juga perlu mencontoh dari negara-negara maju yang telah menjalankan CSR-nya dengan baik. Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 telah membuat Undang-undang (UU) No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU tersebut membahas mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR). Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan dalam UU bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Undang-undang No. 40, 2007).

Di akhir pasal yang menjelaskan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah (PP). Entah apakah UU tersebut kurang kuat atau memang sifatnya belum wajib jika belum diterbitkannya PP, yang jelas akhirnya peraturan lengkap berupa PP sebagai tindak lanjut UU itu akhirnya dikeluarkan pada tahun 2012, yaitu PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Dengan diterbitkannya PP No. 47 Tahun 2012 sebagai peraturan lengkap atau tindak lanjut dari UU No. 40 Tahun 2007, maka saat ini regulasi mengenai kewajiban perusahaan untuk melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi semakin kuat. Di dalam PP tersebut secara jelas disebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Dengan begitu sudah jelas bahwa setelah terbitnya PP No. 47 Tahun 2012 ini tidak ada keraguan lagi bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sifatnya adalah wajib (*mandatory*), bukan sukarela (*voluntary*) lagi.

Meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dimaksud dalam PP tersebut kurang jelas dalam menjelaskan mengenai ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang seperti apa yang di syaratkan, namun dengan diterbitkannya PP No. 47 Tahun 2012 tersebut sudah cukup untuk bisa dijadikan sebagai alasan bahwa perusahaan seharusnya akan lebih terdorong untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya dengan lebih baik dari sebelum PP tersebut dikeluarkan.

Sebelum dikeluarkannya PP No. 47 Tahun 2012, sempat terjadi pro dan kontra mengenai diterbitkannya regulasi yang mewajibkan perusahaan melakukan CSR. Pro dan kontra ini bisa didasarkan pada beberapa argumen. Sebagian perusahaan menganggap aktivitas sosial bukan suatu hal yang penting, sebagian lagi menganggap bahwa CSR itu penting dan perlu dilakukan. Argumentasi yang mendukung menyatakan bahwa CSR diperlukan untuk hal-hal sebagai berikut (Anne, 2005 dalam Marnelly, 2012):

1. Menyeimbangkan antara kekuatan korporasi dengan aspek tanggung jawab;
2. Mengurangi adanya regulasi pemerintah (yang berlebihan);
3. Meningkatkan keuntungan jangka panjang;
4. Meningkatkan nilai dan reputasi korporasi;
5. Memperbaiki permasalahan sosial yang disebabkan oleh perusahaan.

Sedangkan argumentasi yang menentang menyatakan bahwa pada dasarnya CSR hanya (Anne, 2005 dalam Marnelly):

1. Menurunkan efisiensi ekonomi dan keuntungan usaha;
2. Membuat biaya perusahaan lebih tinggi dibandingkan kompetitornya;
3. Menimbulkan biaya tersembunyi yang secara tidak langsung akan dibebankan kepada stakeholder;
4. Mensyaratkan tambahan kemampuan sosial yang sebenarnya tidak dimiliki oleh perusahaan; dan
5. Membebankan tanggungjawab kepada perusahaan yang seharusnya dibebankan kepada individu.

Sikap pro dan kontra ditunjukkan oleh beberapa pihak. Pihak yang kontra terhadap regulasi yang mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR-nya diantaranya disebutkan dalam Sukarmi (2010) yang menyebutkan bahwa kalangan pelaku bisnis yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sangat keras menentang kehadiran dari pasal tersebut. Mereka beralasan bahwa kegiatan CSR berada di luar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam perundang-undangan formal,

seperti ketertiban usaha, pajak atas keuntungan dan standar lingkungan hidup. Jika diatur kembali, selain bertentangan dengan prinsip kerelaan, CSR juga akan memberi beban baru kepada dunia usaha terlebih menggerus keuangan suatu perusahaan.

Sedangkan pihak yang pro diataranya yaitu perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan kegiatan CSR-nya dengan baik walaupun belum tentu semua perusahaan yang menjalankan kegiatan CSR setuju dengan penerbitan regulasi yang mewajibkan pelaksanaan CSR ini, karena bisa saja aktivitas CSR yang dilakukan karena desakan dari pihak lain atau karena motif tertentu yang bukan atas dasar kesadaran sosial dan lingkungan. Di samping itu masyarakat dan pemerintah juga merupakan pihak yang pro dengan PP ini, masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak positifnya, dan pemerintah sendiri sebagai pihak yang mengeluarkan regulasi.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan CSR ini, pemberlakuan CSR secara wajib dapat membuat perusahaan untuk dapat fokus terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Selain itu juga, pemberlakuan CSR secara sukarela dapat menimbulkan persepsi negatif apabila perusahaan melakukan CSR. Hal ini dikarenakan persepsi awal masyarakat bahwa perusahaan hanya mencari keuntungan semata, sehingga CSR merupakan suatu alat mendapatkan keuntungan (Pratama, 2013). Secara teori, motif-motif perusahaan melakukan CSR dapat dijelaskan dalam teori legitimasi dan *stakeholder*. Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, selain mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan,

juga dinyatakan bahwa, “Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS” (Peraturan Pemerintah No. 47, 2012). Dengan demikian, selain perusahaan dituntut untuk melaksanakan CSR, perusahaan juga dituntut untuk melaporkan aktivitas CSR-nya.

Dalam pelaksanaannya, CSR mencakup beberapa bidang, salah satunya CSR dalam bidang lingkungan. Pernyataan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam PP No. 47 Tahun 2012 tersebut jika dilihat maka cenderung ditujukan kepada perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Berdasarkan kecenderungan tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan merupakan faktor paling penting dalam CSR, sehingga CSR dalam bidang lingkungan akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini.. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan bahwa sebagian besar masalah sosial berawal dari masalah lingkungan. Selain itu, dampak yang mempengaruhi lingkungan, secara otomatis juga akan berpengaruh pada aspek sosial karena manusia dan makhluk hidup lainnya selalu memiliki kaitan erat dengan lingkungan.

Kasus perusakan lingkungan yang berdampak pada masalah sosial telah banyak terjadi. Contohnya seperti pada kasus Freeport dan Lapindo. Saat ini permasalahan yang dihadapi Freeport dan Lapindo tidak hanya masalah lingkungan saja, melainkan berdampak kepada masalah sosial. Namun jika dilihat sumber masalahnya, maka awalnya yaitu berasal dari masalah lingkungan. Masalah dengan lingkungan bisa disebabkan karena tidak adanya pertimbangan

jangka panjang akan dampak yang ditimbulkan atas aktifitas yang berhubungan dengan lingkungan atau sumber daya alam. Dengan demikian, masalah lingkungan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Penelitian mengenai kinerja lingkungan yang dihubungkan dengan pengungkapan lingkungan masih menemukan hasil yang berbeda-beda. Penelitian mengenai pengaruh kinerja lingkungan pada pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh Handayani (2010). Kinerja lingkungan diukur dengan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) yang dikeluarkan oleh KLH (Kementrian Lingkungan Hidup). Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh antara kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan.

Penelitian yang paling baru yaitu dilakukan oleh Pratama (2013). Pratama (2013) meneliti tentang pengaruh GCG dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan. Dalam penelitian Pratama (2013), populasi yang diambil yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan PROPER pada rentang waktu tahun 2009-2011. Kinerja lingkungan dinilai menggunakan PROPER, sedangkan pengungkapan lingkungan menggunakan skor yang dinilai menggunakan indeks GRI (*Global Reporting Initiative*) dalam bidang lingkungan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Penelitian lainnya lagi dilakukan oleh Chong dan Freedman (2011). Chong dan Freedman (2011) meneliti hubungan antara GCG, kinerja lingkungan, dan pengungkapan lingkungan. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Lebih lanjut

lagi Chong dan Freedman (2011) menyatakan bahwa hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan mencoba untuk menciptakan reputasi baik di mata masyarakat walaupun kinerja yang sesungguhnya lebih buruk dari yang diungkapkan.

Berdasarkan penemuan Chong dan Freedman (2011) dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa perusahaan hanya menginginkan reputasi baik di mata masyarakat walaupun kinerja yang sesungguhnya masih buruk, maka perlu dilakukan pengujian lagi untuk melihat kesesuaian antara kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan oleh perusahaan di Indonesia. Apabila perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang baik, maka secara otomatis berarti perusahaan telah melaksanakan dengan baik kegiatan CSR-nya khususnya dalam bidang lingkungan. Selanjutnya perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan CSR akan cenderung mengungkapkan kegiatannya tersebut dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan perusahaan karena hal tersebut dapat memberi nilai tambah perusahaan di mata investor maupun masyarakat. Dengan demikian maka seharusnya akan ada hubungan positif antara kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan yang dibuat.

Selain melihat hubungan antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan lingkungan, perlu juga dilakukan pengujian untuk melihat apakah keluarnya PP No. 47 Tahun 2012 sebagai regulasi dari pemerintah mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat mempengaruhi hubungan antara kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan. Dengan diterbitkan PP tersebut, maka perusahaan seharusnya lebih terdorong untuk melakukan kegiatan CSR-nya.

Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan CSR akan cenderung mengungkapkannya dan berusaha melaksanakan CSR-nya dengan baik agar mendapatkan penilaian kinerja yang baik pula. CSR dan pengungkapan yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan dalam bidang lingkungan karena yang menjadi tolak ukur kinerja yaitu PROPER yang merupakan penilaian kinerja lingkungan yang dilaksanakan dan dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang permasalahan dan kajian atas penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis akan membuat penelitian dengan judul, **“PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN DENGAN PP NO. 47 TAHUN 2012 SEBAGAI VARIABEL *MODERATING* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur, Tambang dan Perkebunan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Termasuk dalam PROPER Tahun 2010-2013)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Kerusakan lingkungan akhir-akhir ini sering menjadi salah satu dari beberapa isu yang sering dibicarakan di ruang publik. Salah satu pelaku perusakan lingkungan adalah perusahaan. Di negara berkembang seperti Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan perusahaan juga semakin pesat. Jika dilihat dari sisi ekonomi memang ini adalah kabar baik. Namun dari sudut pandang lingkungan, bertambahnya jumlah perusahaan bisa menjadi salah satu penyumbang dalam kerusakan lingkungan.

Limbah perusahaan maupun aktivitas perusahaan sudah banyak yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Perusahaan sendiri sebenarnya tidak mau aktivitasnya berdampak negatif kepada lingkungan karena hal itu sama saja menurunkan citra perusahaan di mata masyarakat, investor, maupun pihak berkepentingan lainnya. Namun aktivitas perusahaan beberapa memang tidak dapat dipungkiri bahwa pasti akan merusak lingkungan, misalnya adalah aktivitas pertambangan.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai dampak perusahaan terhadap lingkungan tersebut adalah keseriusan perusahaan sendiri dalam mengatasi atau meminimalkan dampak aktivitasnya terhadap lingkungan yaitu melalui kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selain itu peran pemerintah juga penting sebagai pihak yang memberi regulasi terkait dengan tanggung jawab sosial maupun lingkungan.

Perusahaan yang sudah melaksanakan CSR akan cenderung mengungkapkan kegiatan CSR-nya dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. Hal tersebut karena suatu kerugian bagi perusahaan apabila perusahaan tidak mengungkapkan kegiatan CSR yang sudah dilaksanakan karena ini bisa memberi nilai tambah bagi perusahaan di mata masyarakat, investor, dan pihak berkepentingan lain. Ini sesuai dengan prinsip teori legitimasi, yaitu perusahaan ingin terlihat *legitimate* di mata publik.

Selain itu, perusahaan yang sudah melaksanakan CSR-nya seharusnya akan berusaha untuk melaksanakan CSR-nya dengan baik karena Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal ini memiliki program untuk menilai kinerja CSR

yang dikhususkan dalam bidang lingkungan atau bisa disebut kinerja lingkungan dalam program yang dinamakan PROPER. Agar sesuai maka dalam penelitian ini pengungkapan CSR dikhususkan pada pengungkapan lingkungan dikarenakan ukuran kinerja yang digunakan yaitu kinerja lingkungan melalui PROPER.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*) (Kementerian Lingkungan Hidup, 2011).

Permasalahan selanjutnya adalah adanya kemungkinan bagi perusahaan untuk membuat pengungkapan lingkungan dengan sebaik mungkin, namun kinerja lingkungan sebenarnya bisa saja kurang baik. Ini karena perusahaan cenderung hanya ingin dilihat *legitimate* atau baik di mata masyarakat namun kinerja lingkungan sesungguhnya mungkin masih kurang baik. Pada akhirnya terjadi adanya laporan atau pengungkapan lingkungan yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Hal ini sama dengan yang ditemukan oleh Chong dan Freedman (2011) dalam penelitiannya yaitu mendapatkan kesimpulan bahwa perusahaan mencoba untuk menciptakan reputasi baik di mata masyarakat walaupun kinerja yang sesungguhnya lebih buruk dari yang diungkapkan. Untuk itu perlu dilakukan

pengujian apakah tanggung jawab lingkungannya telah diungkapkan sesuai dengan kinerja lingkungan perusahaan.

Di sisi lain pemerintah sebagai salah satu *primary stakeholder*, dalam hal ini menerbitkan regulasi terkait dengan kewajiban perusahaan untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya yaitu terdapat pada Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ditindak lanjuti dengan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas sebagai peraturan pelengkap. Dengan adanya peraturan tersebut maka perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang kemudian kegiatannya dilaporkan dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dimaksud dalam PP No. 47 Tahun 2012 kurang begitu jelas dalam menjelaskan mengenai ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang seperti apa yang di syaratkan, namun dengan diterbitkannya PP tersebut sudah cukup untuk bisa dijadikan sebagai alasan bahwa perusahaan seharusnya akan lebih terdorong untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya dengan lebih baik dari pada sebelum PP ini dikeluarkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini akan dipermudah dengan menjabarkannya kedalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan?

2. Apakah PP No. 47 Tahun 2012 mempengaruhi hubungan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan.
2. Menguji pengaruh terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terhadap hubungan antara kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pendekatan lingkungan dan kesadaran akan pentingnya melakukan tanggung jawab sosial dalam bidang lingkungan.
2. Bagi masyarakat (investor, konsumen, agen, dan lain-lain) agar dapat digunakan sebagai pemahaman akan pentingnya kebijakan lingkungan yang diambil suatu perusahaan sebagai tanggung jawab bersama.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian mempunyai maksud untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terbagi dalam lima bab

dalam yaitu bab pendahuluan, bab telaah pustaka, bab metodologi penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri atas variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan secara sistematis hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta menjelaskan perbandingan antara penelitian ini dengan yang terdahulu.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri atas simpulan dari penelitian yang dilakukan yang telah menjawab seluruh pertanyaan penelitian, keterbatasan penelitian ini, dan saran-saran yang dapat digunakan sebagai acuan oleh peneliti-peneliti lain di masa yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah penerimaan masyarakat akan keberadaan perusahaan. Penerimaan masyarakat ini didasarkan pada keinginan dari masyarakat terhadap perusahaan. Keinginan yang diharapkan masyarakat dengan adanya suatu perusahaan diantaranya yaitu terciptanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat dan kegiatan lain yang dapat memberdayakan masyarakat, sehingga kedepan diharapkan akan tercipta kehidupan yang lebih baik. Menurut Suchman (1995, dalam Anugrah, 2011), legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, sesuai dengan norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial.

Gray et. al (1996 dalam Retno dan Priantinah, 2012) berpendapat bahwa legitimasi merupakan:

“....a systems-oriented view of organisation and society ...permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organisations, the state, individuals and group”.

Dari pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa teori legitimasi merupakan sebuah sistem yang berorientasi pada pandangan organisasi (perusahaan) dan masyarakat. Lebih lanjut lagi, untuk melihat ada tidaknya legitimasi, kita

(peneliti) diperbolehkan untuk fokus kepada peranan informasi dan pengungkapan yang berhubungan dengan sudut pandang perusahaan, pemerintah, individu, maupun kelompok.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat sekitar dan selanjutnya akan mengamankan perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih jauh lagi, legitimasi ini akan meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada nilai perusahaan tersebut (Harsanti, 2011 dalam Setyawan, 2012).

2.1.2 Teori Stakeholder

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang bekepentingan di suatu perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan *stakeholder*. Gray, Kouhy dan Adams (1994 dalam Setyawan, 2007) mengatakan bahwa:

“Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya.”

Didasarkan pada pernyataan di atas, peranan dalam stakeholder sangat penting karena berkaitan dengan keberlanjutan hidup suatu perusahaan. Wheeler dan Sillanpa'a' (1997, dalam Pratama, 2013) membagi *stakeholder* menjadi 2, yaitu *primary stakeholder* dan *secondary stakeholder*. *Primary stakeholder* adalah pihak yang mempunyai penguasaan langsung dari barang-barang yang diperlukan

untuk membantu kebutuhan perusahaan. Sedangkan *secondary stakeholder* adalah pihak-pihak yang tidak langsung menyediakan barang-barang yang dibutuhkan perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh yang bermanfaat dibanding pihak-pihak yang berkepentingan (Pratama, 2013). Contoh nyatanya yaitu pemerintah sebagai *primary stakeholder* dan masyarakat sebagai *secondary stakeholder*.

2.1.3 Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan merupakan penilaian atas aktifitas perusahaan dalam usaha untuk menjaga dan memperbaiki kelestarian lingkungan. Kinerja lingkungan dilakukan sebagai bentuk penilaian atas tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Banyak cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja lingkungan, dua diantaranya bisa menggunakan AMDAL dan PROPER.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Informasi mengenai AMDAL ini bisa didapat pada laporan tahunan perusahaan yang listing di BEI. Kelemahan dari penggunaan AMDAL ini menurut Lindrianasari (2007) adalah hasil AMDAL tidak dapat diketahui apakah masuk kriteria baik apa tidak.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen

informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*). (Kementerian Lingkungan Hidup, 2011)

Model pemeringkatan dalam PROPER ini adalah menggunakan pemeringkatan dan penilaian berdasarkan warna. Dalam PROPER (2013) dijelaskan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang mekanisme dan Kriteria Penilaian PROPER. Kriteria Penilaian PROPER dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kriteria ketaatan yang digunakan untuk pemeringkatan biru, merah, dan hitam. Kriteria ketaatan pada dasarnya adalah penilaian ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup. Peraturan yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah peraturan: Penerapan Dokumen Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
2. Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) untuk pemeringkatan hijau dan emas. Komponen yang dinilai adalah: Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan, Sistem Manajemen Lingkungan, Pemanfaatan Sumber Daya, Pengembangan Masyarakat.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja lingkungan dalam penelitian ini menggunakan PROPER dengan alasan karena lebih mudah digunakan. Kemudahan itu karena terdapat tingkatan dari terbaik hingga terburuk dalam kinerja lingkungan perusahaan dan penilaiannya yang menggunakan simbol warna menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Selain itu, lembaga yang menilai kinerja lingkungan perusahaan merupakan lembaga yang terpercaya yaitu Kementerian Lingkungan Hidup. Mengenai penjelasan masing-masing kriteria peringkat PROPER disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Kriteria Peringkat PROPER

| PERINGKAT WARNA | DEFINISI |
|----------------------------|---|
| EMAS | untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (<i>environmental excellency</i>) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. |
| HIJAU | untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>beyond compliance</i>) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (<i>Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery</i>), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik. |
| BIRU | untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| MERAH | upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi |
| HITAM | untuk usaha dan atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi |

Sumber: Laporan Hasil Penilaian PROPER 2010.

2.1.4 Pengungkapan Lingkungan

Perusahaan dalam kegiatannya tidak hanya melakukan aktivitas produksi saja, namun juga aktivitas lain misalnya yang berhubungan dengan tanggung jawab lingkungan. Setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan harus dilaporkan agar perusahaan memenuhi minimal dua dari lima azas dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Dua asas itu ialah tanggung jawab dan transparansi. Tanggung jawab artinya perusahaan harus benar-benar *responsible* (bertanggung jawab) atas aktivitas yang dilakukan, misalnya bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Kemudian dalam memenuhi asas transparansi perusahaan harus transparan atau terbuka kepada publik atas apa yang dilakukan.

Keterbukaan perusahaan kepada publik salah satunya dapat disampaikan melalui laporan keuangan. Laporan keuangan sangat berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya sebagai sumber informasi untuk mengambil keputusan. Keputusan dalam investasi, produksi, kerjasama, maupun keputusan lain. Informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu mengambil keputusan ekonomi (Chariri & Ghazali, 2001).

Perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) setiap tahunnya wajib untuk menerbitkan laporan tahunan perusahaan. Dalam laporan tahunan mengungkapkan laporan yang sifatnya wajib maupun sukarela. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi tambahan yang relevan diluar

ketetapan standar akuntansi (Pratama, 2013). Sedangkan pengungkapan wajib ialah pengungkapan yang ketetapannya sudah diatur dalam standar akuntansi.

Salah satu contoh bentuk pengungkapan adalah pengungkapan lingkungan. Pengungkapan lingkungan berisi tentang informasi mengenai kegiatan tanggung jawab lingkungan yang dilakukan perusahaan. Pengungkapan lingkungan merupakan informasi penting bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang lingkungan, atau aktifitasnya mempengaruhi lingkungan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan akan fokus kepada informasi tersebut.

Pengungkapan lingkungan merupakan bagian dari pengungkapan CSR yang pengungkapannya masih bersifat sukarela. Karena sifatnya yang masih sukarela, maka belum semua perusahaan mengungkapkan aktivitas CSR-nya. Terdapat alasan-alasan khusus yang menyebabkan perusahaan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas CSR. Alasan-alasan tersebut dapat dijelaskan dalam teori pengungkapan sukarela dan teori sosio-politikal.

Clarkson (2008, dalam Chong dan Freedman, 2011) memiliki pandangan mengenai teori pengungkapan sukarela menyatakan bahwa perusahaan yang telah melakukan kinerja lingkungannya dengan baik akan lebih suka mengungkapkan informasi lingkungannya yang mana hal tersebut tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain yang memiliki kinerja lingkungan buruk.

Dalam teori sosio-politikal, terdapat dua teori yang mendasari yaitu teori *stakeholder* dan teori legitimasi. Teori *stakeholder* didukung oleh pernyataan Gray, Kouhy, dan Lavers (1995, dalam Chong dan Freedman, 2011) yang menyatakan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan karena

diminta oleh para *stakeholder*-nya. Manajer memenuhi kebutuhan *stakeholder* dengan menyediakan informasi lingkungan yang diinginkan dan diperkirakan dapat memuaskan *stakeholder* nya.

Mengenai teori legitimasi, Patten (2000, dalam Chong dan Freedman, 2011) menyatakan bahwa perusahaan berusaha berperilaku seperti yang diinginkan masyarakat. Dengan adanya pengungkapan lingkungan, perusahaan akan membuat dirinya *legitimate* di mata masyarakat, sehingga tuntutan masyarakat akan berkurang.

Sebelum diterbitkannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengungkapan CSR sifatnya masih sukarela. Namun setelah diterbitkannya UU tersebut, pengungkapan CSR menjadi sesuatu yang wajib dilakukan khususnya bagi perusahaan yang bergerak dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dalam UU tersebut khusus pada Pasal 74 hanya sedikit dijelaskan mengenai kewajiban perusahaan dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Pada tahun 2012 akhirnya diterbitkan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang merupakan peraturan lengkap dari peraturan sebelumnya yaitu UU No. 40 Tahun 2007.

Dalam PP No. 47 Tahun 2012, Perseroan Terbatas wajib mengungkapkan laporan CSR nya dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Karena diwajibkannya

pengungkapan CSR, maka pengungkapan lingkungan yang merupakan bagian dari pengungkapan CSR seharusnya ikut menjadi suatu kewajiban.

Ada berbagai macam standar yang digunakan untuk menilai pengungkapan lingkungan, salah satunya adalah menggunakan GRI. Setyawan (2012) mengatakan bahwa standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia menggunakan standar yang dikembangkan oleh GRI. *Global Reporting Initiative* (GRI) adalah sebuah organisasi nirlaba yang memelopori kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial berkelanjutan. GRI menyediakan untuk semua perusahaan dengan kerangka pelaporan berkelanjutan yang komprehensif yang digunakan di seluruh dunia (GRI, 2012 dalam Setyawan, 2012). Dalam penelitian Pratama (2013) yang menganalisis pengaruh GCG dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan juga menggunakan GRI untuk menilai pengungkapan lingkungan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini juga menggunakan indeks GRI sebagai pedoman untuk menilai pengungkapan lingkungan. Selain itu, penilaian CSR menggunakan pedoman indeks GRI telah berlaku secara internasional dan sudah digunakan di banyak negara. Jumlah item pengungkapan CSR menurut GRI adalah 79 item yang terdiri dari: ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), praktik tenaga kerja (14 item), hak manusia (9 item), masyarakat (8 item), dan tanggung jawab produk (9 item).

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan hanyalah indikator kinerja lingkungan (30 item). Kinerja lingkungan mencakup kinerja yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, kepatuhan lingkungan, upaya mengurangi

dampak terhadap lingkungan dan informasi yang berkaitan dengan lingkungan lainnya seperti jumlah limbah dan dampak dari produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan.

2.1.5 Regulasi Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pemerintah merupakan bagian dari *primary stakeholder*. Sesuai dengan tujuan utama perusahaan yaitu untuk memaksimalkan keuntungan *stakeholder*, maka perusahaan wajib mentaati peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang memiliki peran sebagai *primary stakeholder*. Keuntungan di sini tidak dinilai hanya dengan ukuran materi, melainkan bisa berupa kepatuhan terhadap aturan

Dalam hubungannya dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemerintah telah menerbitkan regulasi berupa UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UU tersebut, kewajiban berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dijelaskan pada Pasal 74. Namun dalam UU tersebut hanya sekilas membahas tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, peraturan lanjutan yang melengkapi UU tersebut yaitu terdapat pada PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang merupakan peraturan lengkap dari peraturan sebelumnya yaitu UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74.

Dalam PP No. 47 Tahun 2012 tepatnya pada Pasal 3 dijelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi kewajiban Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Meskipun ada beberapa pihak yang mengatakan ada sedikit kerancuan

dalam PP tersebut berkaitan dengan ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dimaksud. Namun walaupun begitu, regulasi tersebut bisa digunakan sebagai alasan bahwa perseroan khususnya yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam akan lebih terdorong untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya menjadi lebih baik setelah PP ini diterbitkan dari pada sebelumnya. Hal tersebut karena dalam PP tersebut sudah jelas-jelas menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi kewajiban Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sesuai undang-undang serta dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya.

Kemudian pada pasal terakhir yaitu Pasal 9 dalam PP No. 47 tahun 2012 ini menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2012 dengan ditandatangani Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2013) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur dan tambang yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dan termasuk dalam PROPER tahun 2009-2011. Dalam penelitian ini, Pratama (2013)

menggunakan PROPER untuk menilai kinerja lingkungan, kemudian pengungkapan lingkungan menggunakan standar yang di keluarkan oleh GRI. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan..

Penelitian lain yang dilakukan oleh Handayani (2010) bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja lingkungan yang dilakukan perusahaan sejalan dengan pengungkapannya, dan apakah keduanya berpengaruh terhadap kinerja ekonominya. Data penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) pada tahun 2008-2010. Variabel dari penelitian ini ialah pengungkapan lingkungan, kinerja ekonomi, dan kinerja lingkungan. Hasilnya ialah tidak terdapat hubungan antara ketiganya.

Berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Chong dan Freedman (2011) yang menguji hubungan antara *Good Corporate Governance*, pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 perusahaan yang merupakan penghasil polusi terbesar dari 1897 perusahaan yang dihitung dari tahun 2003 hingga 2005. Variabel dari penelitian ini ialah Gov_Score pada (Brown and Caylor, 2006), ukuran polusi, dan skor dari kriteria pengungkapan lingkungan. Hasilnya terdapat hubungan positif antara *Good Corporate Governance* dengan pengungkapan lingkungan. Namun tidak terdapat hubungan antara *Good Corporate Governance* dengan kinerja lingkungan, maupun kinerja lingkungan dengan pengungkapan lingkungan.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti (Tahun) | Variabel | Alat Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|---------------------------|---|---|---|
| 1. | Pratama (2013) | <ul style="list-style-type: none"> • Independen (X): Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Rapat Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kinerja Lingkungan. • Dependen (Y) Pengungkapan Lingkungan | Analisis Regresi OLS (<i>Ordinary Least Square</i>) | Terdapat Hubungan Signifikan positif Antara Rapat Dewan Komisaris dan kinerja lingkungan terhadap Pengungkapan Lingkungan |
| 2. | Handayani (2010) | <ul style="list-style-type: none"> • Independen (X): <i>Environmental Disclosure</i> dan <i>Environmental Perfomance</i> • Dependen (Y): <i>Economic Perfomance</i> dan <i>Environemntal Disclosure</i> | Analisis Regresi OLS (<i>Ordinary Least Square</i>) | Hasilnya ialah tidak terdapat hubungan diantara ketiganya. |
| 4. | Chong dan Freedman (2011) | <ul style="list-style-type: none"> • Independen (X): <i>Good Corporate Governance</i>, <i>Environmental Perfomance</i>, dan <i>Environmental Disclosure</i> • Dependen (Y): <i>Environmental Perfomance</i> dan <i>Environemntal Disclosure</i> | Analisis Regresi OLS (<i>Ordinary Least Square</i>) | Hasilnya hanya terdapat hubungan positif antara <i>Good Corporate Governance</i> dengan <i>Environemntal Disclosure</i> . |

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

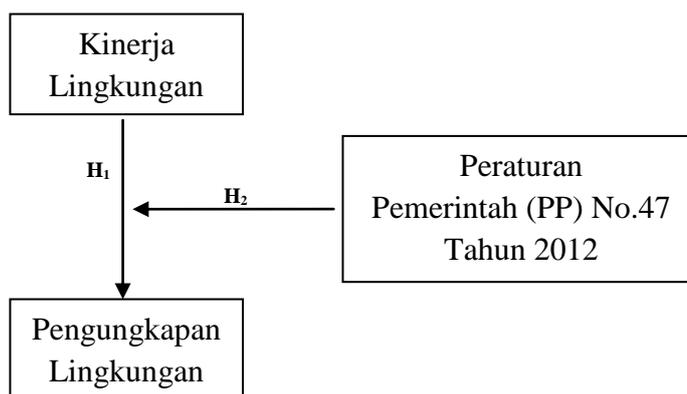
Hubungan antara kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan dapat dijelaskan dalam teori legitimasi dan *stakeholder*. Dalam teori legitimasi, perusahaan harus *legitimate* di mata masyarakat. Salah satu faktor yang dipandang masyarakat ialah masalah lingkungan. Oleh sebab itu, perusahaan harus mempunyai kinerja lingkungan yang baik. Ketika kinerja perusahaan baik, maka perusahaan akan cenderung melakukan pengungkapan lingkungan. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat. Selain itu, pengungkapan lingkungan dapat dikatakan sebagai sarana komunikasi perusahaan dengan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan masalah lingkungan.

Sedangkan dalam teori *stakeholder*, perusahaan berusaha memberikan nilai tambah bagi *stakeholder* nya. Foley (2005, dalam Pratama, 2010) menyatakan bahwa stakeholder dibagi kedalam 2 kategori (yaitu *Primary Stakeholder* dan *Secondary Stakeholder*) sesuai dengan peran dan dampaknya bagi perusahaan. Salah satu *stakeholder* yang sangat berpengaruh adalah pemerintah yaitu sebagai *Primary Stakeholder*. Berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan, maka pemerintah membuat aturan yang tertuang dalam (PP) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan adalah termasuk bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam PP tersebut perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang baik serta mengungkapkannya dalam laporan tahunan

perusahaan. Oleh sebab itu untuk meningkatkan nilai bagi perusahaan adalah dengan mematuhi regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam penelitian ini, variabel independen adalah kinerja lingkungan, sedangkan variabel dependennya adalah pengungkapan lingkungan. Selain menguji pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan, penelitian ini juga menguji pengaruh adanya regulasi pemerintah yaitu dengan menjadikan regulasi pemerintah dalam hal ini yaitu PP No. 47 Tahun 2012 sebagai variabel moderasi. Dijadikannya PP sebagai variabel moderasi tujuannya adalah untuk melihat apakah diterbitkannya PP mempengaruhi hubungan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan. Untuk mempermudah, kerangka teoritis disusun dan digambarkan dengan model sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran Penelitian



2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Lingkungan

Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan salah satunya adalah dengan melakukan kinerja lingkungan. Menurut Berry dan Rondinelle (1998, dalam Pratama, 1998), perusahaan yang maju sekarang melihat kinerja lingkungan sebagai alat untuk menambah nilai etika di masyarakat, memenuhi perlindungan terhadap pekerja, respon atas kebijakan pemerintah dan *stakeholder*, dan membangun kebijakan bisnis baru dalam rangka untuk tetap kompetitif di dalam persaingan dunia usaha.

Perusahaan yang mempunyai kinerja lingkungan yang baik cenderung akan melakukan pengungkapan lingkungan. Hal tersebut agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tahu bahwa perusahaan telah menjalankan tanggung jawab lingkungannya dengan baik. Pihak-pihak tersebut misalnya masyarakat, investor, pemerintah, dan lain-lain. Setelah pihak-pihak tersebut tahu bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab lingkungannya dengan baik, maka perusahaan akan dianggap *legitimate* dan bertanggung jawab.

Masalah yang muncul yaitu adanya fakta dari beberapa penelitian yang menyatakan tidak adanya hubungan antara kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan. Menurut Chong dan Freedman (2011), perusahaan mengungkapkan laporan lingkungan yang luas lebih cenderung untuk mendapatkan sinyal baik dibandingkan dengan fakta kinerja lingkungan yang sesungguhnya. Chong dan Freedman (2011) menyatakan bahwa penemuan ini pada akhirnya mendukung teori legitimasi, tetapi menolak teori pengungkapan sukarela. Hal ini disebabkan

apabila teori pengungkapan sukarela yang diterapkan, maka perusahaan yang kinerja lingkungannya dikatakan buruk akan cenderung menyembunyikan pengungkapan lingkungannya.

Di sisi lain terdapat beberapa penelitian yang membuktikan adanya pengaruh signifikan antara kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan. Penelitian yang dilakukan Pratama (2013) menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa pengungkapan lingkungan yang luas dipengaruhi oleh kinerja lingkungan yang baik pula.

Dalam penelitian ini juga akan menguji pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan dikarenakan pada beberapa penelitian sebelumnya masih memberikan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Kinerja Lingkungan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Lingkungan

2.4.2 Pengaruh PP No. 47 Tahun 2012 terhadap Hubungan antara Kinerja Lingkungan dengan Pengungkapan Lingkungan

Dengan diterbitkannya PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, maka peraturan yang mewajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi semakin kuat. Dengan alasan

mematuhi regulasi dari pemerintah, maka perusahaan seharusnya berusaha untuk mendapatkan kinerja lingkungan dan membuat pengungkapan lingkungannya dengan yang baik setelah terbitnya PP tersebut. Hal ini karena salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan *stakeholder*-nya. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai *primary stakeholder*. Di luar alasan untuk memaksimalkan keuntungan *stakeholder*, perusahaan mematuhi peraturan PP ini juga dikarenakan sifatnya yang memaksa. Memaksa dalam arti apabila perusahaan melanggar aturan yang telah dinyatakan dalam PP tersebut, maka perusahaan akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlunya pengujian untuk melihat pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan setelah PP No. 47 Tahun 2012 adalah bertujuan untuk melihat apakah ada reaksi dari perusahaan terhadap peraturan yang telah diterbitkan tersebut. Hal itu karena Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam PP tersebut secara jelas dinyatakan wajib dilaksanakan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan dikenakan sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakannya. Sedangkan aspek lingkungan sendiri merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR, sehingga peraturan tentang CSR ini bisa dimungkinkan akan berpengaruh terhadap hubungan antara kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan.

Perusahaan yang mematuhi aturan PP No. 47 Tahun 2012 dengan baik, seharusnya kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungannya akan sama-sama mengalami peningkatan sehingga keduanya akan memiliki hubungan yang

semakin kuat. Hal tersebut dikarenakan ketika perusahaan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan baik, secara otomatis perusahaan juga akan berusaha untuk mendapatkan penilaian kinerja yang baik serta cenderung akan mengungkapkan hasilnya pada laporan tahunan atau laporan keberlanjutan perusahaan karena keduanya bisa memberi nilai tambah bagi perusahaan. Alasan-alasan tersebut dapat dijelaskan dengan teori *stakeholder* dan teori legitimasi. Kinerja dan pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di penelitian ini dikhususkan pada aspek lingkungan, karena penelitian ini mengacu pada hasil penilaian kinerja lingkungan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup melalui program PROPER.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: PP No. 47 Tahun 2012 memperkuat Hubungan antara Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Lingkungan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini ialah pengungkapan lingkungan, sedangkan variabel independennya ialah kinerja lingkungan. Kemudian yang menjadi variabel moderasi adalah PP No. 47 Tahun 2012.

3.1.1 Pengungkapan Lingkungan

Pengungkapan lingkungan adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan lingkungan diukur dengan skor sesuai dengan kriteria pengungkapannya. Kriteria pengungkapan lingkungan didasarkan pada pedoman indeks CSR dalam bidang lingkungan yang dikeluarkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*).

Hal ini dikarenakan penilaian CSR menggunakan pedoman indeks GRI telah berlaku secara internasional serta telah digunakan di banyak negara. Jumlah item CSR pengungkapan menurut GRI adalah 79 yang terdiri dari: ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), praktik tenaga kerja (14 item), hak manusia (9 item), masyarakat (8 item), dan tanggung jawab produk (9 item).

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan hanyalah indikator kinerja lingkungan (30 item). Kinerja lingkungan mencakup kinerja yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, kepatuhan lingkungan, dan informasi yang berkaitan lainnya seperti limbah lingkungan dan dampak dari produk dan jasa.

3.1.2 Kinerja lingkungan

Kinerja lingkungan perusahaan diukur dari PROPER yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). PROPER merupakan program KLH untuk menilai prestasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungannya. PROPER menggunakan peringkat untuk mengukur kinerja lingkungan perusahaan. Terdapat lima (5) kategori yang ditandai dengan warna-warna sebagai pemeringkatnya. Urutan peringkat dari yang terkecil ke yang terbesar dalam PROPER adalah hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Kriteria dalam peringkat PROPER sebagai berikut

1. Peringkat “Emas” (Skor 5)

yaitu untuk usaha dan atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan

2. Peringkat “Hijau” (Skor 4)

yaitu untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

3. Peringkat “Biru” (Skor 3)

yaitu untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah

mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Peringkat “Merah” (Skor 2)

yaitu untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Peringkat “Hitam” (Skor 1)

yaitu untuk usaha dan atau kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berarti.

Dalam penelitian ini digunakan data ordinal yaitu pengukuran kinerja lingkungan menggunakan skor 1 hingga 5. Untuk perusahaan yang memiliki banyak anak dan mendapat peringkat proper yang berbeda maka dalam penelitian ini skornya didapat dengan menghitung nilai rata-ratanya. Karena skor PROPER masih dalam bentuk data ordinal, maka nantinya data ordinal akan dirubah menjadi data interval dengan menggunakan metode MSI (*Method of Successive Interval*). Hal ini dikarenakan dalam analisis regresi tidak diperbolehkan menggunakan data nominal atau ordinal (non-metrik).

3.1.3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas adalah regulasi dari pemerintah yang berisi tentang kewajiban

perusahaan untuk melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR. PP tersebut mewajibkan bagi CSR kepada Perseroan terbatas yang kegiatan usahanya kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Dalam PP ini juga disebutkan bahwa Perseroan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya. PP ini berlaku mulai 4 April 2012 sesuai dengan tanggal diundangkannya yang disahkan dan ditandatangani oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam analisis regresi, variabel PP No. 47 Tahun 2012 ini selanjutnya disingkat dengan sebutan PP saja. Variabel ini dinilai dengan kategori angka “0” dan “1” atau bisa disebut dengan variabel dummy. Angka “0” untuk mewakili perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan sebelum diterbitkannya PP No. 47 Tahun 2012 yaitu untuk tahun 2010-2011. Kemudian angka “1” untuk mewakili perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan sesudah diterbitkannya PP No. 47 Tahun 2012 yaitu untuk tahun 2012-2013.

3.2 Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan PROPER. Sampel penelitian ini diambil dengan teknik *puspositive sampling* yaitu perusahaan manufaktur, tambang dan perkebunan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan yang mengikuti Program Penilaian

Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) pada tahun 2010-2013 dan telah menerbitkan laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan/atau laporan keberlanjutan (*sustainability report*) pada tahun 2010-2013.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk publikasi. Jenis data sekunder ini dipilih untuk menghemat waktu dan biaya serta data yang diperoleh lebih valid. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah berupa publikasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan masing-masing perusahaan per Desember tahun 2010-2013 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan data PROPER tahun 2010-2013 yang diambil dari situs Kementerian Lingkungan Hidup.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah studi pustaka. Untuk mendapatkan data kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri dokumen laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan PROPER. Sebagai tambahan, untuk pengungkapan lingkungan, digunakan instrumen penelitian berupa *check list* item pengungkapan sesuai indikator lingkungan GRI. Sedangkan PP No. 47 Tahun 2012 hanya digunakan sebagai penanda apakah perusahaan membuat laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan sebelum tahun 2012 ataukah pada tahun 2012 dan

setelahnya. Dimana tahun 2012 adalah tahun PP No. 47 Tahun 2012 tersebut disahkan. Selanjutnya nilai dari variabel PP ini dinilai menggunakan *dummy*.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011).

3.5.2 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi. Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Square-OLS*) merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik (*Best Linear Unbias Estimate-BLUE*).

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Alat uji yang digunakan adalah dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S). Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S) adalah (Ghozali, 2011):

1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.

2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini diuji dengan Uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut terhadap variabel independen (Gujarat, 2003 dalam Ghozali, 2011). Variabel dengan nilai signifikansi diatas 0,05 menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi penelitian ini menggunakan metode uji Run Test. Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara *random*

(Ghozali, 2011). Model yang baik apabila nilai signifikansi diatas 0,05 sehingga data dapat dikatakan *random*.

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan variabel *moderating*. Ada 2 model regresi yang akan digunakan. Model pertama digunakan untuk mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya dan dapat menunjukkan arah pengaruh tersebut. Sedangkan model kedua digunakan untuk melihat pengaruh variabel moderating terhadap hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya.

Persamaan regresi yang akan diuji ada 2, yaitu sebagai berikut:

1. $\text{Ln.PL} = \alpha + \beta_1 \text{KL} + \varepsilon$
2. $\text{Ln.PL} = \alpha + \beta_1 \text{Ln.KL} + \beta_2 \text{PP} + \beta_3 \text{KL.PP} + \varepsilon$

dimana:

Ln.PL = Logaritma Natural dari Pengungkapan Lingkungan

Ln.KL = Logaritma Natural dari Kinerja Lingkungan

KL = Kinerja Lingkungan

PP = Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012

KL.PP = Kinerja Lingkungan dikali Pengungkapan Lingkungan

α = Konstanta

β = Konstanta

ε = Error

3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Bila terdapat nilai adjusted R² bernilai negatif, maka nilai adjusted R² dianggap bernilai nol.

3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi simultan (uji statistik F) bertujuan untuk mengukur apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi F dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Cara pengujian simultan terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5 persen maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

- b. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5 persen maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2011), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel pejelasan/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pengujian berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak, yang berarti koefisien regresi tidak signifikan. Ini berarti bahwa secara parsial, variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$, maka koefisien regresi bersifat signifikan dan secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.